

Implementasi Program Politeknik Agraria STPN: Digitalisasi Data Pertanahan Kalurahan untuk Mendukung Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Kalurahan Pampang

Ardhi Arnanto*¹, Harvini Wulansari², Tatag Bagus Narendra³

^{1,2,3}Program Studi Sarjana Terapan Pertanahan, Politeknik Agraria STPN, Indonesia

*e-mail: ardhi.arnanto@stpn.ac.id¹, harvini@stpn.ac.id², tatagbagus@stpn.ac.id³

Abstrak

Pengelolaan data pertanahan di Kalurahan Pampang yang masih manual dengan menggunakan buku letter C dan peta konvensional menghadapi kendala fisik dokumen yang rapuh, keterbatasan kompetensi sumberdaya manusia pamong kalurahan, serta lambatnya pelayanan administrasi. Permasalahan ini menghambat pencapaian target ke-9 Sustainable Development Goals (SDGs) terkait industri, inovasi, dan infrastruktur digital di tingkat kalurahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan program alih teknologi dan digitalisasi data pertanahan melalui peran Politeknik Agraria STPN serta mengevaluasi tingkat kepuasan pengguna terhadap program tersebut. Metodologi penelitian menggunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, dan Product) dengan pengukuran skala Likert untuk menilai tingkat kepuasan pamong kalurahan. Responden penelitian ini adalah 8 orang pamong kalurahan yang menggunakan sistem informasi pertanahan kalurahan (SIMPEL). Program dilaksanakan dengan mengintegrasikan program pembelajaran Praktik Kerja Lapangan (PKL), Magang Berdampak, dan Pemberdayaan Masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa integrasi pembelajaran PKL berhasil memetakan dan menyusun basis data spasial serta tekstual bagi 2.725 bidang tanah. Output program pemberdayaan masyarakat adalah aplikasi SIMPEL berbasis web yang berhasil mengatasi kendala spesifikasi komputer dengan kemampuan grafis rendah di kantor kalurahan. Hasil evaluasi CIPP menunjukkan predikat Sangat Puas pada seluruh variabel, yaitu Konteks (4,34), Masukan (4,21), Proses (4,25), dan Produk (4,54). Kesimpulannya, implementasi program pendidikan tinggi politeknik yang terintegrasi mampu mendorong transformasi digital pertanahan kalurahan dan mendukung pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs).

Kata kunci: Digitalisasi Data Pertanahan, Politeknik Agraria STPN, Sustainable Development Goals (SDGs), Kalurahan Pampang.

Abstract

Land data management in Pampang Village remains manual, using letter C books and conventional maps, and faces issues such as fragile physical documents, limited competence among village officials, and slow administrative services. This problem hinders progress toward the 9th Sustainable Development Goal (SDG) on industry, innovation, and digital infrastructure at the village level. This study aims to implement a technology transfer program and digitize land data through Politeknik Agraria STPN and to evaluate user satisfaction with the program. The respondents in this study were 8 village officials who use the village land information system (SIMPEL). The research methodology uses the CIPP evaluation model (Context, Input, Process, and Product) with a Likert scale to assess village officials' satisfaction. The program integrated the Field Work Practice (PKL), Impactful Internship, and Community Empowerment learning programs. The results showed that integrating PKL learning successfully mapped and compiled a spatial and textual database for 2,725 land plots. The output Community Empowerment program is a web-based application called SIMPEL; it overcame the graphic limitations of the village office's computer hardware specifications. The CIPP evaluation results showed a Very Satisfied rating across all variables: Context (4.34), Input (4.21), Process (4.25), and Product (4.54). In conclusion, implementing an integrated polytechnic higher education program has proven effective in accelerating the digital transformation of village land administration and supporting the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs).

Keywords: Land Digitalization Data, Polytechnic, Sustainable Development Goals (SDGs), Pampang Village

1. PENDAHULUAN

Tanah menjadi sumberdaya yang sangat penting untuk mendukung aktivitas masyarakat kalurahan yang bertumpu pada sektor pertanian sebagai sumber pendapatan utama. Pendataan dan pencatatan data-data pertanahan menjadi sangat penting bagi Pemerintah Kalurahan agar perencanaan program-program pemerintah menjadi lebih tepat. Permasalahan data pertanahan di Pemerintah Kalurahan saat ini masih kompleks dan mencakup berbagai aspek, mulai dari kendala fisik dokumen tradisional hingga tantangan kesiapan infrastruktur untuk mendukung teknologi modern. Pemerintahan kalurahan masih mengelola data pertanahan secara manual menggunakan buku besar tradisional seperti buku *Letter C* dan buku Krawangan (Azzarunnisa & Krishantoro, 2026; Budi Agung et al., 2025; Ningtyas et al., 2026; Mahmudah et al., 2024; Arnanto dkk., 2025).

Dokumen pertanahan yang ada di Pemerintaha Kalurahan sebagian besar telah mencapai puluhan tahun, bahkan ada dokumen yang telah berusia lebih dari 70 tahun, sehingga fisik dari dokumen tersebut menjadi sangat rapuh, sobek, usang, tulisannya memudar, dan rusak jilidnya (Arnanto dkk., 2025; Ningtyas dkk., 2026). Pemerintah desa di beberapa daerah, seperti Kabupaten Blitar, Trenggalek, dan Kota Batu, diperkirakan sekitar 70% hingga 72% buku *Letter C* berada dalam kondisi rusak berat. Dokumen fisik dari data pertanahan yang disimpan di lemari atau gudang yang bukan ruang khusus arsip tanpa perawatan yang memadai membuat sangat rentan hilang, lapuk, terbakar, mengalami kerusakan akibat kelembaban, atau bahkan dimakan oleh rayap (Ningtyas dkk., 2026; Arnanto dkk., 2025; Mahmudah dkk., 2024).

Kondisi data yang masih manual juga mempengaruhi optimalisasi pelayanan informasi pertanahan dari Pemerintah Kalurahan. Pencatatan yang masih bersifat manual menghambat efisiensi pelayanan administrasi pertanahan bagi masyarakat kalurahan. Pelayanan informasi pertanahan kepada masyarakat menjadi lama karena pamong harus mencari dan menelusuri lembaran arsip fisik satu per satu dari tumpukan buku. Proses pencarian ini sering memakan waktu berjam-jam hingga hitungan hari (Mahmudah dkk., 2024; Azzarunnisa & Krishantoro, 2026). Transaksi atau peristiwa hukum atas tanah yang terjadi karena transaksi jual-beli, waris, hibah, atau wakaf pada tanah yang sudah bersertifikat dilakukan langsung tanpa dicatatkan kembali ke kantor desa. Hal ini mengakibatkan informasi sejarah kepemilikan tanah pada buku *Letter C* tidak mengalami pembaruan (Arnanto dkk., 2025). Permasalahan lain yang ada di tingkat Pemerintah Kalurahan adalah tidak sinkronnya data wajib pajak bumi dan bangunan. Perbedaan data pemilik tanah menyebabkan kesalahan penginputan data atau salah sasaran pada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB yang menyebabkan lokasi objek pajak tidak diketahui, luasannya tidak sesuai, atau subjek pajaknya tidak ditemukan (Arnanto dkk., 2023).

Permasalahan lain yang dihadapi Pemerintah Kalurahan adalah pencapaian target program dari pemerintah pusat, termasuk pencapaian target *sustainable development goals* (SDGs) dengan berbagai keterbatasan sumberdaya manusia dan infrastruktur yang dimiliki. Salahsatu target SDGs, yaitu target ke-9 adalah industri, inovasi dan infrastruktur yang dalam konteks kalurahan menekankan pada digitalisasi layanan kalurahan untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan ekonomi. Penerapan program digitalisasi kalurahan, seperti konsep *Smart Village*, sistem pelaporan keuangan digital, dan layanan informasi pertanahan sering terhambat oleh minimnya infrastruktur teknologi informasi dan rendahnya literasi digital masyarakat. Permasalahan pada aspek sumberdaya manusia menunjukkan transformasi digital di kalurahan cenderung hanya mampu diadaptasi oleh kelompok muda yang melek teknologi, sementara pamong kalurahan masih banyak dari kelompok usia tua (Ladini & Yuwono, 2026). Berbagai kendala program digitalisasi layanan pemerintah kalurahan, termasuk layanan informasi pertanahan harus dicarikan solusi untuk mendukung pencapaian target SDGs yang telah ditetapkan.

Digitalisasi data pertanahan yang merupakan penguatan infrastruktur digital menjadi bagian dari target SDGs ke-9 juga mendapatkan berbagai hambatan permasalahan. Aparatur kalurahan umumnya tidak memiliki kompetensi dalam mengoperasikan aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG) atau basis data spasial. Beberapa kajian menyebutkan pamong

kalurahan yang bertanggung jawab atas urusan pertanahan, seperti kepala seksi pemerintahan atau jogoboyo sudah berusia lanjut di atas 40 tahun atau menjelang pensiun, sehingga sangat lambat dalam beradaptasi terhadap perubahan teknologi (Maytha Mesty Wibowo dkk., 2025). Beberapa perangkat kalurahan tetap mempertahankan praktik kerja manual paralel dengan tetap mencatat manual di kertas karena kekhawatiran akan malafungsi sistem atau kehilangan data digital, hal ini menghambat transisi penuh ke sistem digital (Zulfikar dkk., 2026; Ningtyas dkk., 2026). Gab infrastruktur dan penguasaan teknologi yang lebar membutuhkan peran perguruan tinggi yang mempunyai tanggungjawab untuk terlibat dalam program pemberdayaan masyarakat melalui tri darma pendidikan tinggi. Perguruan tinggi mempunyai peran untuk mempersempit gab tersebut agar transisi dari budaya manual ke digital menjadi lebih baik.

Tanggungjawab ini juga menjadi kewajiban bagi Politeknik Agraria STPN yang memiliki karakteristik khas yang kuat pada hilirisasi Teknologi Tepat Guna (TTG) dan digitalisasi praktis. Perguruan tinggi politeknik memiliki peran yang sangat strategis dan khas dalam program pemberdayaan masyarakat. Berbeda dengan pendidikan akademik teoretis, politeknik berfokus pada pendekatan vokasional yang mengutamakan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi secara langsung untuk menyelesaikan masalah riil di masyarakat. Politeknik berperan merancang, memfabrikasi, dan menghilirkan teknologi fisik maupun digital yang dirancang khusus untuk memecahkan hambatan operasional dan meningkatkan produktivitas, seperti pemanfaatan teknologi *Internet of Things* (IoT) untuk melakukan monitoring kontrol kualitas air kolam (Gautama dkk., 2025). Program pemberdayaan masyarakat tidak sekadar mendonasikan alat fisik, melainkan bertanggung jawab membangun kapasitas teknis masyarakat agar mampu mengadopsi, merawat, dan mengembangkan teknologi tersebut secara mandiri (Adriati Wijayanti dkk., 2026). Peran strategis ini harus mampu dijalankan dalam mengatasi permasalahan gab penguasaan teknologi untuk menjalankan digitalisasi data-data pertanahan kalurahan.

Gab penguasaan teknologi juga terjadi di Kalurahan Pampang yang menjadi lokasi pelaksanaan program pembelajaran dan pengabdian masyarakat Politeknik Agraria STPN. Kalurahan Pampang sangat menarik menjadi lokasi program karena seluruh pamong kalurahan yang berjumlah 17 orang tidak ada yang menguasai aplikasi yang terkait dengan pengelolaan data-data spasial, terutama data pertanahan (Arnanto dkk., 2025). Kesenjangan ini menjadi sangat menarik dan relevan untuk dicarikan solusi melalui program-program tridharma perguruan tinggi yang ada di Politeknik Agraria STPN.

2. METODE

Metode penelitian dengan pendekatan CIPP (*Context, Input, Process, dan Product*) adalah salah satu model evaluasi pertama yang awalnya digunakan dalam dunia pendidikan yang diperkenalkan oleh Stufflebeam pada tahun 1965. Model evaluasi ini banyak dipilih dan digunakan karena berfokus pada perbaikan sistem (*system improvement*) secara keseluruhan, bukan sekadar untuk membuktikan suatu titik tertentu di dalam sistem. Model CIPP dirancang secara sistematis sebagai panduan komprehensif untuk mengevaluasi suatu program, mulai dari tahap awal penilaian hingga evaluasi hasil akhir. Pendekatan CIPP mempunyai 4 komponen (variabel) utama yang harus diukur, yaitu (Hartati dkk., 2018):

- a. Evaluasi Konteks (*Context Evaluation*)
Evaluasi konteks bertujuan untuk memastikan apakah perencanaan dan desain program sudah sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.
- b. Evaluasi Masukan (*Input Evaluation*)
Evaluasi masukan berfokus untuk memperoleh informasi mengenai sumber daya manusia, fasilitas dan instrumen pendukung, dana atau anggaran, serta prosedur dan regulasi yang diperlukan untuk memenuhi tujuan program. Hal ini digunakan untuk menilai kesiapan seluruh sumber daya dan sarana sebelum program dijalankan.
- c. Evaluasi Proses (*Process Evaluation*)

Evaluasi proses bertujuan untuk memeriksa apakah rencana program yang telah disiapkan dapat langsung dieksekusi atau memerlukan penyesuaian, perbaikan, dan inovasi selama masa implementasinya.

d. Evaluasi Produk (*Product Evaluation*)

Evaluasi produk menekankan pada pencapaian tujuan yang telah ditentukan selama tahap perencanaan dan mengevaluasi hasil akhir dari program tersebut.

Hasil evaluasi dari model ini sangat berguna bagi para pengambil keputusan untuk menentukan apakah suatu program perlu dipertahankan, dimodifikasi, atau diperbaiki di masa mendatang (Maulana dkk., 2018).

Setiap variabel akan diukur melalui wawancara dengan kuisioner tertutup yang disajikan dalam skala likert. Rerata skala linkert yang didapat digunakan sebagai dasar untuk mengklasifikasikan predikat kepuasan pengguna terhadap program yang diimplementasikan oleh Politeknik Agraria STPN. Kajian yang dilakukan oleh Setiawan dkk. pada tahun 2025 menjelaskan klasifikasi predikat kepuasan menjadi 5 kelas, lihat tabel 1.

Tabel 1. Predikat Kepuasan Pengguna

Kode Predikat Kepuasan	Predikat Kepuasan	Skor
1	Sangat Tidak Puas	1,00 - 1,80
2	Tidak Puas	1,81 - 2,60
3	Cukup Puas	2,61 - 3,40
4	Puas	3,41 - 4,20
5	Sangat Puas	4,21 - 5,00

Sumber: Setiawan dkk., 2025

Wawancara dilakukan pada seluruh pamong yang menggunakan Sistem Informasi Pertanian Kalurahan (SIMPEL), yaitu sebanyak 8 orang pamong. Instrumen wawancara menggunakan kuesioner yang berisi pertanyaan untuk menilai variabel evaluasi konteks, evaluasi masukan, evaluasi proses, dan evaluasi produk. Nilai setiap variabel diukur dengan skala likert dengan rincian evaluasi konteks terdapat 8 indikator penilaian, evaluasi konteks terdapat 3 indikator penilaian, evaluasi proses terdapat 3 indikator, dan evaluasi produk terdapat 3 indikator. Nilai predikat kepuasan merupakan rereta dari masing-masing indikator pada setiap variabel.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Implementasi Program Politeknik Agraria STPN untuk Masyarakat Kalurahan

Perguruan tinggi memiliki peran yang penting dalam mendorong kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat kalurahan melalui pendekatan tridharma perguruan tinggi, baik dalam program pendidikan, penelitian, dan pemberdayaan masyarakat (Sigit dkk., 2025). Kajian tentang implementasi program perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi vokasi atau politeknik dapat dikelompokkan menjadi program hilirisasi teknologi tepat guna (TTG), fasilitator alih pengetahuan (*knowledge transfer*) dan kemandirian, pengembangan potensi kalurahan, pendorong transisi energi bersih dan kelestarian lingkungan, penggagas kolaborasi multi-pihak (tata kelola kolaboratif), serta tempat aktualisasi pembelajaran dan kegiatan sosial mahasiswa (Gautama dkk., 2025; Adriati Wijayanti dkk., 2026; Jaya dkk., 2024; (Yunus Maulana & Bakhrun, 2024).

Politeknik Agraria STPN yang merupakan perguruan tinggi vokasi di bidang agraria dan tata ruang mengimplementasikan berbagai program, baik itu pendidikan, penelitian, dan pemberdayaan masyarakat yang mendukung kemajuan bagi masyarakat kalurahan. Salahsatau lokasi tempat pelaksanaan program tersebut adalah Kalurahan Pampang, Kapanewon Paliyan, Kabupaten Gunungkidul. Implementasi program yang dijalankan oleh Politeknik Agraria STPN

di Kalurahan Pampang bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur dan kapasitas pamong kalurahan dalam mengelola data pertanahan secara digital. Rencana pelaksanaan program disusun dengan mempertimbangkan kegiatan pendidikan yang ada didalam kurikulum Program Studi Sarjana Terapan Pertanahan dan Program Pengabdian Masyarakat yang ada di Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

Kajian bersama antara Politeknik Agraria STPN dan Pemerintah Kalurahan Pampang dilaksanakan melalui kegiatan *focus group discussion* (FGD) untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan data pertanahan kalurahan, lihat gambar 1. Dokumen-dokumen pertanahan kalurahan yang penting, seperti buku *letter C*, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB, dan Peta Blok PBB disimpan secara manual dalam bentuk cetak di lemari berkas. Peta *letter C* yang merupakan peninggalan zaman kolonial Belanda sudah mulai rusak karena faktor usia kertas. Data tahun 2022 menunjukkan bahwa dari total 17 orang pamong Kalurahan Pampang tidak ada yang memiliki kemampuan teknis untuk mengoperasikan aplikasi pengelolaan data pertanahan. Permasalahan yang lain terkait dengan sumberdaya manusia adalah sebagian besar pamong sudah berusia lanjut dengan kemampuan penguasaan komputer dasar (Arnanto dkk., 2025).



Gambar 1. Kegiatan FGD di Kalurahan Pampang
Sumber: Laporan Pemberdayaan, 2022

Berbagai permasalahan ini jelas menjadi tantangan besar bagi Pemerintah Kalurahan Pampang dalam mencapai target ke-9, yaitu industri, inovasi dan infrastruktur yang dalam konteks kalurahan menekankan pada digitalisasi layanan kalurahan untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan ekonomi. Proses alih pengetahuan dan kemandirian kalurahan akan berjalan sangat lambat jika tidak melibatkan peran Perguruan Tinggi Politeknik. Berbagai program hilirisasi teknologi yang berdampak langsung pada masyarakat diharapkan dapat dihasilkan dari Perguruan Tinggi Politeknik. Percepatan digitalisasi layanan kalurahan di bidang pertanahan harus mengintegrasikan program pendidikan dan pengabdian masyarakat yang ada di Politeknik Agraria STPN.

Adapun tahapan rencana program alih pengetahuan dan membangun kemandirian Pemerintah Kalurahan Pampang dapat dibagi kedalam 3 tahapan kegiatan, yaitu:

1) Penyusunan Basisdata Pertanahan Kalurahan

Ketersediaan data pertanahan kalurahan masih dalam bentuk cetak dengan kondisi yang tidak bagus mengharuskan program penyusunan basisdata pertanahan kalurahan yang baru. Luaran program ini diharapkan mampu menyusun basisdata bidang tanah seluruh kalurahan yang sudah berisi informasi tematik. Kebutuhan ini dapat disinkronkan dengan kegiatan pembelajaran yang ada di kurikulum Program Studi Sarjana Terapan Pertanahan. Kegiatan pembelajaran aktivitas berupa praktik kerja lapangan (PKL) dilaksanakan 3 kali, yaitu di semester 2, 3, dan 4. PKL Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan

Pemanfaatan Tanah (IP4T) membekali taruna untuk dapat melakukan kegiatan pendataan data dan informasi tematik bidang tanah. PKL Pengukuran Bidang dan Penilaian Tanah membekali taruna untuk dapat melakukan pengukuran bidang tanah secara kadastral dan memvaluasi nilai tanah. PKL Pemetaan Tematik dan Analisis Penatagunaan Tanah membekali taruna untuk dapat melakukan pemetaan tematik berbasis zona dalam mendukung analisis penatagunaan tanah (Kurikulum Program Studi Sarjana TerapanPertanahan, 2020).

Kegiatan penyusunan basisdata pertanahan kalurahan diintegrasikan dengan kegiatan pembelajaran di Politeknik Agraria STPN. Peta bidang tanah yang menjadi data dasar untuk menyusun informasi tematik dihasilkan dari kegiatan pembelajaran PKL Pengukuran Bidang dan Penilaian Tanah. Luaran dari PKL ini adalah peta bidang tanah seluruh Kalurahan Pampang dalam format digital *shapefile* (.shp). Basisdata ini menjadi dasar dalam menyusun informasi tematik bidang tanah yang dihasilkan dari PKL Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T).

2) Perancangan dan Pelatihan Sistem Informasi Pertanahan Kalurahan (SIMPEL)

Kendala keterbatasan infrastruktur dan sumberdaya manusia dalam mengelola basisdata pertanahan kalurahan menjadi alasan tentang pentingnya pengembangan sistem informasi pertanahan kalurahan. Politeknik Agraria STPN dan Pemerintah Kalurahan Pampang merumuskan solusi alternatif dengan merancang sistem informasi pertanahan berbasis web bernama Sistem Informasi Pertanahan Kalurahah (SIMPEL). Sistem berbasis web ini memanfaatkan jaringan internet kalurahan yang sudah cukup bagus, sehingga pamong tidak memerlukan laptop berspesifikasi grafis tinggi untuk mengelola data pertanahan.

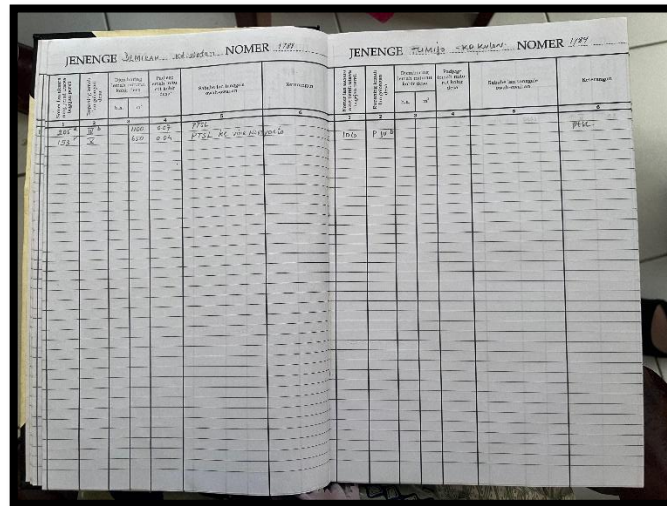
3) Pendampingan Pembaruan Data SIMPEL

Program pelatihan menjadi unsur penting dalam proses alih pengetahuan (*knowledge transfer*). Pelatihan hanya memberikan pengetahuan yang terbatas karena hanya dilaksanakan selama 2 hari. Alih pengetahuan teknologi informasi akan menjadi efektif jika dilakukan proses pendampingan secara baik dan berkelanjutan. Program pendampingan ini diintegrasikan dengan program pembelajaran taruna Politeknik Agraria STPN melalui "Program Magang Berdampak". Pendampingan dapat dilakukan oleh taruna yang mengikuti Program Magang Berdampak selama 6 bulan di Kantor Kalurahan.

3.2. Digitalisasi Data Pertanahan Kalurahan

Data-data pertanahan yang dimiliki oleh Pemerintah Kalurahan Pampang masih dalam bentuk data cetak (*hardcopy*). Dokumen pertanahan yang penting, seperti buku *letter C*, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) (PBB), serta Peta Blok PBB disimpan seluruhnya dalam format cetak dan disimpan dalam lemari yang bukan khusus untuk penyimpanan dokumen. Buku *letter C* berwujud buku tebal yang diisi secara manual dengan tulisan tangan menggunakan bolpoin atau pensil. Format fisik konvensional ini membuat data pertanahan sangat rentan mengalami kerusakan akibat faktor usia, sobek, dimakan rayap, lapuk, ataupun risiko bencana seperti kebakaran, lihat gambar 2.

Peta blok *letter C* yang berfungsi sebagai satu-satunya data spasial kalurahan, selain peta blok PBB merupakan peta peninggalan zaman kolonial Belanda yang kertasnya sudah berusia puluhan tahun. Kondisi peta saat ini sudah sangat rapuh, sulit dirawat, dan informasi yang ada pada peta tersebut hanya nomor persil serta kelas tanah, lihat gambar 3. Banyak perubahan yang terjadi di lapangan dalam kurun waktu puluhan tahun tidak pernah ada proses pembaruan data pada peta tersebut. Hal ini menyebabkan informasi yang ada pada peta sudah jauh berbeda dengan kondisi lapangan. Perubahan kepemilikan, batas bidang tanah, pemecahan dan penggabungan, serta penggunaan tanah tidak dapat tercatat dengan baik.



Gambar 2. Buku *Letter C*
Sumber: Pemerintah Kalurahan Pampang, 2024



Gambar 3. Peta Blok *Letter C*
Sumber: Pemerintah Kalurahan Pampang, 2024

Kondisi data pertanahan Kalurahan Pampang ini menjadi dasar untuk menyusun kegiatan digitalisasi data pertanahan kalurahan. Kegiatan digitalisasi data pertanahan dibagi kedalam 3 tahapan kegiatan sebagaimana berikut:

a) Penyiapan Peta Kerja

Data awal yang digunakan untuk merencanakan kegiatan lapangan adalah peta kerja. Peta kerja disusun dari beberapa sumber yang sudah ada, yaitu peta blok *letter c*, peta blok PBB, data bidang tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul, dan citra satelit resolusi tinggi. Kegiatan penyusunan peta kerja diintegrasikan dengan mata kuliah Studio Penyusunan Peta Kerja yang ada didalam kurikulum Program Studi Sarjana TerapanPertanahan. Luaran dari mata kuliah ini adalah peta rencana yang digunakan sebagai acuan dalam pekerjaan pengukuran bidang tanah.

b) Pengukuran Bidang Tanah

Tahapan ini merupakan kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang dilakukan diseluruh wilayah Kalurahan Pampang. Kegiatan ini diintegrasikan dengan kegiatan pembelajaran taruna Politeknik Agraria STPN yang mengikuti mata kuliah PKL Pengukuran Bidang dan Penilaian Tanah. Taruna melakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah selama 11 hari pada tahun 2021. Luaran dari proses pembelajaran ini adalah peta

bidang tanah Kalurahan Pampang yang berisi informasi pemilikan, status, dan nilai tanah. Basisdata ini menjadi peta dasar yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan yang dibutuhkan oleh kalurahan (*multipurpose cadastre database*).

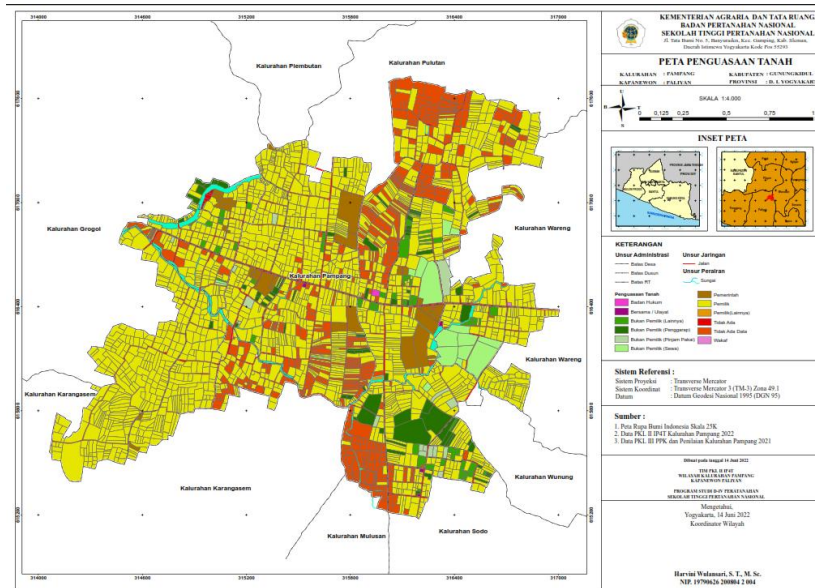
c) Pemetaan Tematik Bidang Tanah

Tahapan ini merupakan kegiatan untuk melakukan inventarisasi dan pendataan informasi tematik berbasis bidang tanah atau sering disebut juga dengan sensus pertanahan. Setiap bidang tanah diberikan informasi tentang penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T). Data didapatkan dengan cara survei sensus pada setiap bidang tanah yang ada di kalurahan Pampang. Kegiatan ini diintegrasikan dengan kegiatan pembelajaran taruna Politeknik Agraria STPN yang mengikuti mata kuliah PKL Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah. Kegiatan ini dilaksanakan selama 11 hari pada tahun 2022, lihat gambar 4. Luaran dari proses pembelajaran ini adalah basisdata P4T dengan ditambahkan informasi kependudukan yang berbasis bidang tanah (*multipurpose cadastre*).



Gambar 4. Kegiatan PKL IP4T
Sumber: Laporan PKL IP4T, 2022

Pelaksanaan kegiatan digitalisasi data pertanahan kalurahan yang dilaksanakan dalam 3 tahapan kegiatan diatas menghasilkan basisdata tematik berbasis bidang tanah di seluruh wilayah kalurahan Pampang, lihat gambar 5. Kedua Praktik Kerja Lapangan (PKL) Taruna Politeknik Agraria STPN mampu mengukur dan memetakan seluruh bidang tanah di Kalurahan Pampang sebanyak 2.725 bidang tanah dengan tambahan informasi kependudukan dalam format *shapefile* (.shp) dan PDF. Basisdata ini menjadi tahapan awal dalam proses transformasi digital yang harus didorong untuk mewujudkan kemandirian Pemerintah Kalurahan Pampang yang mandiri dalam pengelolaan basisdata pertanahan. Keberhasilan transformasi digital tidak hanya didukung oleh infrastruktur yang kuat, tetapi juga dukungan sumberdaya manusia yang mampu beradaptasi dengan budaya digital. Permasalahan sumberdaya manusia di kalurahan yang sebagian besar tidak memiliki keterampilan dalam mengoperasikan aplikasi pengelolaan data spasial pertanahan harus diberikan solusi. Jika dilihat dari sudut pandang demografi, pamong kalurahan mayoritas telah berusia lanjut dan kesulitan dalam proses transformasi ke budaya digital.



Gambar 5. Peta Hasil Praktik Kerja Lapangan
Sumber: PKL IP4T, 2022

3.3. Evaluasi dan Dampak Program Pendidikan Tinggi Politeknik bagi Pencapaian Target SDGs

Pencapaian target SDGs (*Sustainable Development Goals*) di wilayah desa menghadapi berbagai tantangan kompleks, mencakup aspek finansial, kelembagaan, sosial-budaya, kesenjangan teknis, dan gender (Tisnanta dkk., 2024). Dalam konteks kerjasama Program Pendidikan Politeknik Agraria STPN dan Pemerintah Kalurahan Pampang dalam mencapai target ke-9, yaitu industri, inovasi dan infrastruktur yang menekankan pada infrastruktur digital untuk layanan Pemerintah Kalurahan yang lebih modern juga mendapatkan tantangan yang hampir sama. Permasalahan kelembagaan yang belum adaptif terhadap digitalisasi, kesenjangan teknis, dan sumberdaya manusia. Proses selanjutnya setelah basisdata pertanahan kalurahan dapat tersusun adalah bagaimana menyiapkan infrastruktur dan sumberdaya manusia pamong kalurahan agar dapat secara mandiri mampu mengelola basisdata tersebut.

Kondisi data pertanahan Kalurahan Pampang yang telah berubah dari data cetak menjadi basisdata digital melalui integrasi program pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat yang diinisiasi oleh Politeknik Agraria STPN tidak akan banyak bermanfaat jika tidak diimbangi oleh infrastruktur dan sumberdaya manusia yang kompeten untuk mengelola data tersebut. Program lanjutan yang dirancang dalam format pemberdayaan masyarakat telah disusun, yaitu berupa pelatihan aplikasi SIG bagi pamong kalurahan. Program ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar dalam mengelola data pertanahan digital dengan aplikasi ArcGIS. Program pelatihan ini dilaksanakan selama 2 hari di tahun 2023, lihat gambar 6.

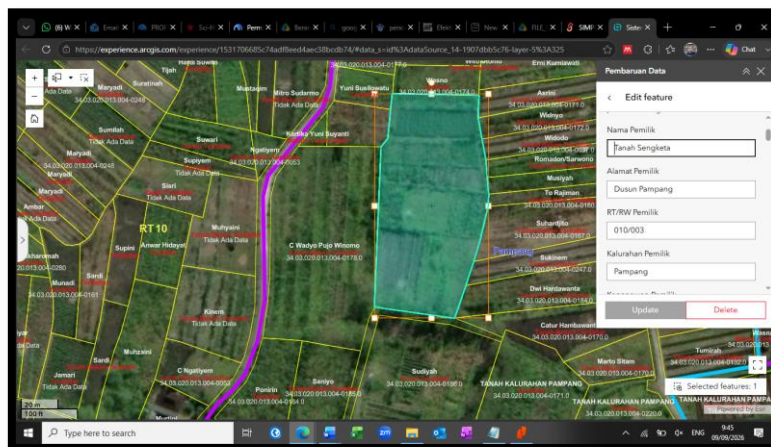
Hasil evaluasi program pelatihan ini menyebutkan bahwa infrastruktur pendukung, seperti laptop yang dimiliki oleh Pemerintah Kalurahan Pampang tidak mampung mendukung aplikasi ArcGIS. Laptop yang digunakan berjumlah 3 tetapi hanya 1 laptop yang mampu diinstal aplikasi ArcGIS. Program ini mampu meningkatkan jumlah pamong kalurahan yang menguasai ArcGIS Desktop, dari 1 orang menjadi 7 orang. Evaluasi program pada tahun 2024 menunjukkan pengelolaan data berbasis ArcGIS ini terhenti setelah pelatihan selesai karena keterbatasan perangkat keras komputer yang tidak memadai untuk program ArcGIS, serta kurangnya dukungan anggaran nyata (Arnanto dkk., 2025).

Program yang disusun untuk mengatasi kendala terkait dengan spesifikasi komputer kalurahan adalah dengan merancang sistem informasi pertanahan berbasis web untuk kalurahan Pampang, yaitu SIMPEL (Sistem Informasi Pertanahan Kalurahan), lihat gambar 7. Perancangan sistem ini diawali dengan kegiatan *focus group discussion* (FGD) untuk membahas kebutuhan pengguna dan sistem.



Gambar 6. Pelatihan Aplikasi SIG bagi Pamong Kalurahan
Sumber: Laporan Kegiatan Pengabdian Masyarakat, 2023

Hasil kajian terhadap infrastruktur perangkat keras komputer dan jaringan internet menunjukkan bahwa sistem berbasis web lebih tepat diimplementasikan di Kalurahan Pampang. Sistem berbasis web ini memanfaatkan jaringan internet kalurahan yang bagus, sehingga pamong tidak memerlukan laptop berspesifikasi grafis tinggi untuk mengelola data pertanahan. Sistem ini dikembangkan oleh tim pengabdian masyarakat Politeknik Agraria di tahun 2023 dan diujicobakan di Kalurahan Pampang pada tahun 2024. Tahap awal implementasi SIMPEL adalah pelatihan bagi pamong kalurahan agar dapat menguasai sistem informasi ini. Pelatihan SIMPEL dilaksanakan selama 2 hari bagi 5 pamong kalurahan yang ditugaskan khusus mengelola data. Hasil evaluasi pelaksanaan pelatihan SIMPEL menunjukkan seluruh peserta berhasil menguasai keterampilan input data, pembaruan (update) data secara online, hingga pencetakan informasi pertanahan secara mandiri (Arnanto dkk., 2025).



Gambar 7. Tampilan Antar Muka SIMPEL
Sumber: Aplikasi SIMPEL, 2026

Program pelatihan SIMPEL yang hanya memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar bagi pamong kalurahan tidak akan cukup sebagai bekal dalam melaksanakan implementasi pengelolaan data pertanahan di Kantor Kalurahan. Oleh karena itu, program lanjutan yang diperlukan adalah pendampingan secara intensif untuk mengimplementasikan sistem ini dengan data riil. Program pendampingan pamong kalurahan diintegrasikan dengan program pembelajaran “Magang Berdampak” yang dilaksanakan oleh taruna semester 7 selama 6 bulan. Sebanyak 8 taruna melakukan magang di Kantor Kalurahan Pampang untuk melakukan

pendampingan dan menyusun program-program pemberdayaan masyarakat. Selama 6 bulan di Kantor Kalurahan, taruna akan melakukan pendampingan teknis agar transfer keterampilan teknis untuk melakukan pembaruan data, baik itu penambahan atau perubahan data yang sudah ada dapat berjalan dengan baik, lihat gambar 8.



Gambar 8. Kegiatan Pendampingan Pamong Kalurahan
Sumber: Dokumen Magang Berdampak, 2025

Implementasi program pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat Perguruan Tinggi Politeknik dalam mendukung digitalisasi layanan Pemerintah Kalurahan untuk mencapai target SDGs diukur tingkat kepuasan pengguna agar dapat dievaluasi. Perspektif pamong kalurahan yang memanfaatkan sistem informasi pertanahan kalurahan akan diukur dengan menggunakan metode CIPP (Context, Input, Process, and Product). Hasil kajian dari perspektif 8 orang pamong yang menggunakan SIMPEL didapat sebagai berikut:

a) Konteks (*Context*)

Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur apakah perencanaan dan desain program digitalisasi data pertanahan kalurahan sudah sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kalurahan Pampang. Hasil nilai perspektif pengguna untuk variabel konteks menunjukkan nilai 4,34, lihat tabel 2. Nilai ini berarti menunjukkan bahwa perspektif predikat kepuasan penerima program digitalisasi data pertanahan di Kalurahan Pampang adalah sangat puas dan menilai bahwa program yang dilaksanakan sudah sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kalurahan Pampang dalam mendorong tercapainya data digital pertanahan kalurahan yang akan mendukung perbaikan layanan informasi pertanahan.

Indikator paling kecil menunjukkan salah satu kendala didalam program digitalisasi data pertanahan kalurahan adalah belum adanya regulasi di tingkat kalurahan maupun kabupaten yang mendukung program tersebut. Hal ini menyebabkan penganggaran oleh Pemerintah Kalurahan untuk mendukung program tersebut menjadi terhambat. Inisiasi regulasi untuk mendukung program ini menjadi sangat penting untuk mendorong pencapaian target SDGs Pemerintah Kalurahan dalam penyediaan infrastruktur teknologi informasi.

Tabel 2. Analisis Variabel Context

Kode Indikator	Indikator Penilaian	Skor
C1	Data-data analog (cetak) dan manual menjadi tantangan utama dalam memberikan pelayanan pertanahan di kalurahan.	4,50
C2	Lurah dan pamong kalurahan sangat menyadari pentingnya digitalisasi.	4,50
C3	Infrastruktur kalurahan sudah sangat siap untuk mendukung program digitalisasi data pertanahan kalurahan.	3,88
C4	Pemerintah Kabupaten dan/atau Pemerintah Kalurahan sudah mempunyai regulasi yang mendukung program digitalisasi data pertanahan kalurahan.	3,50
C5	Pemerintah Kalurahan dapat menganggarkan program digitalisasi data pertanahan kalurahan dengan sumber anggaran kalurahan.	4,13
C6	Program ini sangat bermanfaat bagi Pemerintah Kalurahan	4,88
C7	Program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat	4,75
C8	Program ini sangat bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten	4,63
Rerata Variabel Context		4,34

Sumber: Pengolahan Data, 2026

b) Masukan (*Input*)

Evaluasi masukan merupakan analisis memperoleh informasi mengenai sumber daya manusia, fasilitas dan instrumen pendukung, dana atau anggaran, serta prosedur dan regulasi yang diperlukan untuk memenuhi tujuan target pencapaian SDGs. Hal ini digunakan untuk menilai kesiapan seluruh sumber daya dan sarana sebelum program tersebut dijalankan. Hasil analisis pada variabel masukan masih masuk dalam predikat sangat puas tetapi nilai 4,21 merupakan batas bawah dalam klasifikasi predikat sangat puas, lihat tabel 3. Indikator terkait dengan kesiapan perangkat lunak dan keras untuk mendukung program digitalisasi data pertanahan masih dibawah angka predikat sangat puas, yaitu 3,63. Hal ini harus menjadi perhatian dari Pemerintah Kalurahan Pampang untuk mengalokasikan anggaran untuk memperkuat kekurangan di infrastruktur perangkat lunak dan keras.

Tabel 3. Analisis Variabel Masukan

Kode Indikator	Indikator Penilaian	Skor
I1	Pemerintah Kalurahan sudah mempunyai dukungan perangkat lunak dan perangkat keras untuk mendukung program digitalisasi data pertanahan.	3,63
I2	Pelatihan aplikasi SIMPEL Kalurahan Pampang sangat efektif untuk membekali kemampuan pamong dan staf kalurahan.	4,50
I3	Pendampingan teknis sangat diperlukan oleh Pemerintah Kalurahan (misal dalam bentuk Program Pemberdayaan atau Program Magang Berdampak/KKN)	4,50
Rerata Variabel Input		4,21

Sumber: Pengolahan Data, 2026

c) Proses (*Process*)

Evaluasi proses bertujuan menganalisis apakah rencana program yang telah disiapkan dapat langsung dilaksanakan atau masih memerlukan beberapa penyesuaian, perbaikan, dan inovasi selama masa implementasinya. Hasil analisis memberikan nilai yang sangat baik, yaitu 4,25 yang berarti masuk dalam kategori sangat puas, lihat tabel 4. Penyusunan program yang

melibatkan Pemerintah Kalurahan Pampang dengan model FGD (*Focus Group Discussion*) membuat gab antara kebutuhan dan perancangan program menjadi kecil. Hal ini berdampak pada implementasi program tidak membutuhkan banyak penyesuaian. Proses penyusunan rencana dan implementasinya mampu mendorong Pemerintah Kalurahan dalam mencapai perbaikan infrastruktur teknologi informasi yang menjadi target pencapaian SDGs.

Tabel 4. Analisis Variabel Proses

Kode Indikator	Indikator Penilaian	Skor
P1	Pemerintah Kalurahan dilibatkan dalam penyusunan Sistem Informasi Pertanahan Kalurahan (SIMPEL) Pampang	4,63
P2	Pamong Kalurahan aktif menggunakan SIMPEL selama masa ujicoba implelementasi	3,88
P3	Pamong dapat memberikan umpan balik dan masukan ke STPN terkait pengembangan SIMPEL	4,25
Rerata Variabel Process		4,25

Sumber: Pengolahan Data, 2026

Keaktifan pamong kalurahan selama pelaksanaan uji coba hanya mendapatkan nilai 3,88, masih dibawah nilai 4. Hal ini disebabkan oleh beban pekerjaan pamong kalurahan yang banyak sehingga setiap pamong tidak hanya mengurus layanan atau pengelolaan informasi pertanahan saja. Kegiatan input atau pembaruan data-data yang ada di SIMPEL hanya dilakukan diwaktu-waktu luang setelah pekerjaan utama selesai. Hal ini menjadi salahsatu hasil evaluasi yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Kalurahan agar dapat mengalokasikan sumberdaya manusia yang memang ditugaskan untuk mengurus data-data digital Kantor Kalurahan.

d) Produk (*Product*)

Evaluasi produk menganalisis pencapaian tujuan yang telah ditentukan selama tahap perencanaan dan mengevaluasi hasil akhir dari program tersebut. Variabel produk mempunyai nilai rereta peringkat kepuasan paling tinggi, yaitu 4,54 lihat pada tabel 5. Hal ini menunjukkan bahwa produk dari program digitalisasi data pertanahan kalurahan yang berupa basisdata tematik bidang tanah dan sistem informasi pertanahan kalurahan (SIMPEL) memiliki predikat kepuasan yang sangat tinggi. Hal ini berarti produk ini membantu tranformasi digital yang ditargetkan oleh Pemerintah Kalurahan Pampang dalam rencana aksi pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Tabel 5. Analisis Variabel Produk

Kode Indikator	Indikator Penilaian	Skor
PD1	Layanan pertanahan menjadi lebih efektif dan efisien setelah adanya aplikasi SIMPEL Kalurahan Pampang.	4,63
PD2	Pamong dan staf Kalurahan mudah dalam mengakses dan mencari informasi pertanahan.	4,25
PD3	Sistem Informasi Pertanahan Kalurahan (SIMPEL) Pampang dapat digunakan secara berkelanjutan oleh Pemerintah Kalurahan Pampang.	4,75
Rerata Variabel Product		4,54

Sumber: Pengolahan Data, 2026

4. KESIMPULAN

Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Integrasi kegiatan pembelajaran Praktik Kerja Lapangan (PKL) taruna Politeknik Agraria STPN berhasil mengukur, memetakan, dan penyusunan basis data tematik bidang tanah seluruh bidang tanah di Kalurahan Pampang sebanyak 2.725 bidang yang disajikan dalam format shapefile (.shp) dan PDF;
- 2) Integrasi Program Pemberdayaan Masyarakat dan Magang Berdampak mampu memberikan solusi kendala spesifikasi komputer di kantor kalurahan yang tidak mendukung untuk mengoperasikan perangkat lunak SIG berbasis desktop dengan mengembangkan aplikasi SIMPEL (Sistem Informasi Pertanahan Kalurahan) berbasis web. Aplikasi ini didukung dengan pelatihan serta pendampingan teknis secara berkelanjutan selama 6 bulan oleh 8 taruna melalui Program Magang Berdampak;
- 3) Pengukuran peringkat kepuasan berbasis metode CIPP menunjukkan tingkat kepuasan pada predikat Sangat Puas untuk seluruh variabel, yaitu Konteks (4,34), Masukan (4,21), Proses (4,25), dan Produk (4,54);
- 4) Kekurangnya pada indikator pendukung perangkat keras dan lunak, yaitu dengan nilai 3.63 perlu mendapat perhatian Pemerintah Kalurahan agar program digitalisasi data pertanahan dapat berjalan dengan baik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lurah dan seluruh Pamong Kalurahan Pampang yang telah memberi dukungan dana, pikiran, dan tenaga dalam pelaksanaan program pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat yang diinisiasi oleh Politeknik Agraria STPN.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriati Wijayanti, R., Widjajanti, K., Hariyadi, A., Elfa Mas, P., Novianti, A., & Hudiono. (2026). Penerapan Teknologi Tepat Guna Mesin Pencacah untuk Meningkatkan Efisiensi Produksi Pakan Ternak Bebek Berbasis Limbah Organik. *Jurnal Pengabdian Polinema Kepada Masyarakat*, 13(2), 77–83. <https://doi.org/10.33795/jpkm.v13i2.9107>
- Arnanto, A., Suharno, S., & Supriyanti, T. (2023). Pemanfaatan basis data pendaftaran tanah sistematis lengkap untuk penyusunan kadaster multiguna di kabupaten Boyolali. *Tunas Agraria*, 6(2), 125–137. <https://doi.org/10.31292/jta.v6i2.218>
- Arnanto, A., Wijayanti, T. I., & Wulansari, H. (2025). Pelatihan Digitalisasi Data Pertanahan bagi Pemerintah Kalurahan Pampang, Kapanewon Paliyan, Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 5(2), 425–438. <https://doi.org/10.54082/jamsi.1644>
- Azzarunnisa, K., & Krishantoro, W. (2026). Analisis Sistem Informasi Pendataan Pertanahan di Balai Desa Pesayangan. *Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika*, 10(2), 2514–2518. <https://doi.org/10.36040/jati.v10i2.17480>
- Budi Agung, R., Wulandari, S., Rahmawati Rahayu, R., & Kunci, K. (2025). Implementasi Aplikasi Identitas Tanah (SIDENTAH) Pada Desa Mangunarga Sumedang Implementation of the Land Identity Application (SIDENTAH) in Mangunarga Village, Sumedang. *KOMATIKA*, 5(1), 8–14. <https://doi.org/10.34148/komatika/v5i1.1073>
- Gautama, A., Mahdaliza, R., Jaka Wimbang Wicaksono, M., Syafi, A., Mutia Lubis, E., Oktani, D., Gusnam, thiana, Syafei Gozali, M., & Fitri, N. (2025). Monitoring dan Kontrol Kualitas Air Kolam Ikan Berbasis IoT. *Abdimas-Polibatam*, 7(1).
- Hartati, S. J., Sayidah, N., & Muhajir. (2018). The use of CIPP model for evaluation of computational algorithm learning program. *Journal of Physics: Conference Series*, 1088. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1088/1/012081>

- Jaya, R., Ohyver, D. A., Muhtasom, A., & Ab, A. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata Melalui Pelatihan Pengelolaan Homestay dan Kebersihan. *Journal of Tourism Dedication P-ISSN XXXXX / E-ISSN XXXXXXX, 1(1)*. <http://journal.poltekparmakassar.ac.id/index.php/padaidi>
- Kurikulum Program Studi Sarjana Terapan Pertanian, Legislation 1752/SK-800.36/IX/2020, Program Studi Sarjana Terapan Pertanian (2020).
- Ladini, M., & Yuwono, T. (2026). Multi-Level Governance In The Making Of Smart Villages: Policy Alignment and Digital Transformation in Central Java, Indonesia. *Acta Innovations*, 29–38. www.actainnovations.com
- Mahmudah, N., Ningrum, I. K., & Yuwita, P. E. (2024). Pelatihan Aplikasi Dokumen Pertanahan Menuju Desa Digital Pada Pemerintah Desa Kujang. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(6), 1841–1851. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v8i6.23313>
- Maulana, I., Sumarto, Nurafiati, P., & Puspita, R. H. (2018). Evaluation Program on the Implementation of Industrial Apprenticeship (Prakerin) in Electrical Engineering. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 306(1). <https://doi.org/10.1088/1757-899X/306/1/012059>
- Maytha Mesty Wibowo, A., Ashari Nur, S., Ageng Puspitasari, S., Shulha Agustina, I., Elfa Maharani, C., Zulfikar Purwanto, alfad, Studi Manajemen, P., Ekonomi, F., & Tidar, U. (2025). Peningkatan Literasi Digital Dan Digitalisasi Data Desa di Kabupaten Magelang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Thut Nyak Dhien*, 4(2), 46–58. <https://doi.org/10.36490/jpmtnd.v4i2.1733>
- Ningtyas, E. W., Fanida, E. H., & Oktariyanda, T. A. (2026). Inovasi Alih Media Arsip Tanah (Adiarta) oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu. *Publika*, 14, 97–106.
- Setiawan, E., Rochmadi, T., Yazid, A. S., Wicaksono, Y., Jailani, M., & Informasi, S. (2025). Pengukuran Tingkat Kepuasan Pengguna Portal Berita Headline Media Menggunakan Metode EUCS. *INTECH*, 6(1), 69–82. <https://doi.org/10.54895/INTECH.V6I1.3025>
- Sigit, O., Wiwaha, S., Harijanto, P. S., Kurniawan, B. I., Hermawan, S. L., Nurhadi, S., Ronilaya, F., & Malang, P. N. (2025). Hybrid Charging Station untuk Kemandirian Energi Peternak Sapi Perah. *JPM Jurnal Pengabdian Mandiri*, 4(10). <https://bajangjournal.com/index.php/JPM>
- Tisnanta, H. S., Sabatira, F., Putri, R. W., Pereira, L., & Rakhma Banjarani, D. (2024). Navigating Legal Complexities in Localising the Sustainable Development Goals Agenda for Village Governance in Indonesia Navigating Legal Complexities in Localising the Sustainable Development Goals Agenda for Village Governance in Indonesia Article Abstract. *Sriwijaya Law Review* ■, 8. <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol8.Iss2>
- Yunus Maulana, M., & Bakhrun, A. (2024). The Impact of Sense of Community and Civic Engagement on The Well-Being of Student Executive Board Members of Politeknik Negeri Bandung. *Jurnal Kewarganegaraan*, 21(2), 248–264. <https://doi.org/10.24114/jk.v2>
- Zulfikar, R., Durahman, D., Putra, P. A. A., & Kurniawan, C. S. (2026). Digital Land Registration Transformation: Does Indonesia's PTSL Program Guarantee Legal Cetainty, Equaty, and Justice? *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, 11, 327–348. <https://doi.org/10.22373/petita.v.11i1.951>

Halaman ini dikosongkan